

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Trias politika merupakan teori yang menerapkan pembagian kekuasaan pemerintah negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Trias Politika pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, seorang pemikir politik asal Prancis. Saat ini, penerapan Trias Politika dilakukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Montesquieu mengemukakan teori Trias Politika yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga jenis. Teori ini kemudian banyak diadopsi pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Tiga jenis kekuasaan pada teori Trias Politica meliputi kekuasaan (pelaksana undang-undang), kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang).

Dalam pelaksanaannya untuk menjalankan sistem pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi digunakan di Indonesia karena demokrasi memberikan penyetaraan terhadap warga negara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memberikan izin kepada warga negara nya berpartisipasi langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi melingkupi sosial dan budaya serta kondisi ekonomi yang memungkinkan kebebasan politik

secara bebas dan setara tanpa dibeda bedakan. Demokrasi juga mengandung makna penghargaan harkat dan martabat manusia, maka dari itu masyarakat dalam hidup didalam lingkup suatu negara memiliki kebebasan dalam berserikat dan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh sebabnya masyarakat bisa mengkritisi kinerja pemerintahan tanpa ada sanksi hukum dari negara karena sistem yang dianut oleh Indonesia adalah sistem demokrasi yang melindungi hak-hak warga negara dalam mengemukakan pendapat tanpa memandang ras, agama, sosial, maupun kedudukan ekonomi seseorang. Namun yang patut diperhatikan adalah cara mengemukakan pendapat warga yang baik dan benar seperti apa agar tidak dapat dijerat hukum dan menjadi kritik membangun bukan menjadi kritik yang rasial atau berbentuk penghinaan. Dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri membutuhkan peran dari partai politik.

Partai politik ialah organisasi politik yang memiliki sebuah ideologi atau dibentuk dengan tujuan yang umum. Partai politik juga dapat diartikan sebuah kelompok yang anggotanya memiliki pemikiran tertentu dan cita-cita yang sama. Tujuan umum dari partai politik ialah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang dimaksud di dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus tujuan partai politik ialah untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan

memperjuangkan cita-cita partai politik serta membangun budaya dan etika politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Maka dari itu peran partai politik sangat sentral dalam pelaksanaan sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila di Indonesia. Karena peran partai politik ialah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan maupun pendidikan politik di lingkup masyarakat. Tujuan dari partai politik pun ialah sebagai wadah aspirasi maupun wadah untuk tujuan memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Lalu partai politik juga wajib dalam fungsi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik juga selain meningkatkan dari segi partisipasi masyarakat partai politik pun memiliki kewajiban dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi politik kepada masyarakat atau dapat diartikan memberikan pendidikan politik dan indoktrinasi politik masyarakat agar menjadikan masyarakat yang cerdas dalam menyikapi segala peristiwa politik agar tidak dapat terjebak kedalam ketidakmengertian mengenai sistem politik di Indonesia.

Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi lain melalui berbagai perantara media misalnya keluarga, partai politik, sekolah, media massa dan lain sebagainya agar tercipta masyarakat yang paham mengenai politik dan mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi kedalam politik. Sosialisasi politik dianggap hal penting dalam pelaksanaan politik di Indonesia karena sosialisasi politik memiliki peran untuk dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk supaya masyarakat dapat memahami dan bisa menyikapi dalam

peristiwa politik yang terjadi serta indoktrinasi politik juga penting untuk keberlangsungan partai untuk dapat memberikan ideologi partai kepada masyarakat untuk masyarakat bisa memilih haluan politik mereka untuk mengikuti partai tersebut atau memilih haluan partai lain yang sesuai dengan ideologi masyarakat tersebut.

Sosialisasi politik juga dapat digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan pengetahuan tentang politik kepada masyarakat secara efektif. Sosialisasi politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan politik dapat dilihat dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Selanjutnya pendidikan politik juga diatur di dalam UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik diatur dalam bab XIII pasal 31 tentang pendidikan politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Lalu diatur dalam PP no.1 tahun 2018 pasal 9 mengenai bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Pentingnya sosialisasi politik ialah meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas dalam bersikap politik dalam segala peristiwa yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Pemilu daerah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh suara sebanyak 39.565 dari 7 orang kader terpilih di pemilu legislatif Kabupaten Bandung Barat. Namun pada pemilu tahun 2014 partai PDIP Kabupaten Bandung Barat mendapatkan jumlah kursi yang lebih baik, yaitu mendapatkan 12 kursi di DPRD Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menjadi tanda tanya terkait penurunan suara dan kursi partai PDIP di Kabupaten Bandung Barat dari 2014 mendapatkan 12 kursi namun pada pemilu legislatif 2019 hanya mendapatkan 7 kursi. Penurunan suara yang dialami oleh PDIP di Kabupaten Bandung Barat menjadi hal yang serius dan patut untuk diperhatikan karena jika penurunan suara yang dialami oleh partai PDIP ini dibiarkan akan menyebabkan penurunan kualitas kader jika pendidikan politik tidak dibenahi dan hal terburuk yang akan terjadi adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kader partai.

Disini sosialisasi politik politik perlu di munculkan kedalam permukaan dengan model yang lebih baik, karena dengan adanya pendidikan politik kepada masyarakat dapat sekaligus memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat mengenai keberpihakan partai itu dimana dan sampai dimana. Dengan begitu selain memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pandangan politik mereka mengenai jalan pemerintahan yang baik agar mereka dapat memilih dan dapat berpandangan positif mengenai politik di Indonesia agar mereka juga dapat pemahaman yang baik mengenai calon kader yang akan diusung dan dapat

menaruh harapan besar terhadap calon kader walaupun mengalami peristiwa tidak mengenakan di dalam tubuh partai.

Dengan pendidikan politik kepada masyarakat yang diselenggarakan menjadikan masyarakat yang kritis dalam menghadapi suatu kecurangan dalam pemilu, menjadikan kader yang akan duduk di kursi pemerintahan adalah kader yang memang dianggap mampu dan bisa dari segi pengetahuan dan integritas untuk menjalankan pemerintahan. Bukan kader yang hanya mampu beretorika tapi tidak mampu membuktikan janji-janji manis mereka ketika dalam masa kampanye.

Guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi pemerintah dan menciptakan masyarakat yang siap dan mampu kritis dalam menghadapi masa pemilu, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perlu melakukan pendidikan politik masyarakat serta sejauh mana partai PDIP DPC Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan amanat dari Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2011.

Adapun penelitian terdahulu dengan peneliti bernama Aris Tri Wibowo, dengan judul “Peran Partai Politik Golkar Dalam Pendidikan Politik (Studi Kasus di DPD Partai GOLKAR Kabupaten Sragen)”. Dengan hasil penelitian pendidikan politik yang di sampaikan kepada kader untuk memberikan pemahaman tentang kepartaian, tentang program partai dan visi misi. Kader partai GOLKAR diberikan pemahaman politik agar tidak buta akan perkembangan saat ini. Bahkan perkembangan politik internasional pun di berikan untuk menambah wawasan yang lebih luas memberikan pendidikan politik kepada kader agar dapat bisa

berbicara langsung menghadapi masyarakat dan di berikan pemahaman kepartaian, nasionalisme, pancasila dan kebangsaan.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu terfokus dalam memberikan pendidikan dan pemahaman tentang kepartaian, program partai, dan visi misi partai kepada masyarakat. Sedangkan penelitian ini terfokus dalam pendidikan politik kepada masyarakat agar menciptakan masyarakat yang berkualitas yang dilaksanakan DPC Partai PDIP di Kabupaten Bandung Barat serta meneliti tentang pelaksanaan amanat UU RI No. 2 Bab XIII Pasal 31 Tahun 2011 tentang partai politik. Sehingga penelitian ini masih relevan untuk dilanjutkan.

Bagaimana proses penyelenggaraan partai politik yang dilakukan oleh PDIP, guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik serta dapat kritis dalam memilih calon yang akan maju di pemilu. Sehubungan dengan penjelasan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan tertarik untuk mengambil judul **“MODEL SOSIALISASI POLITIK MASYARAKAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang hendak dicapai maka kiranya dirumuskan pokok permasalahan: “Model Sosialisasi Politik Masyarakat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bandung Barat” dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh PDIP Kabupaten Bandung Barat.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan sosialisasi politik masyarakat
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi politik masyarakat

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1.3.1.1. Tujuan Umum

Tujuan yang hendak dicapai terhadap penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dan data-data informasi terhadap masalah yang akan diteliti dan dirumuskan, maka tujuan umum dari permasalahan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji agar bisa mendapatkan sebuah pengetahuan maupun penemuan baru. Adapun untuk membuktikan dan menguji kebenaran dari bidang ilmu yang telah ada.

1.3.1.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus merupakan uraian yang lebih detail dari tujuan umum. Adapun juga secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Guna mengetahui dan mengkaji model sosialisasi politik yang digunakan oleh PDIP Kabupaten Bandung Barat.
- b. Guna mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan sosialisasi politik masyarakat dan sebagai

bahan evaluasi agar dapat meningkatkan standar sosialisasi politik yang lebih baik.

- c. Guna mengetahui upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi politik masyarakat.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat serta dapat menjadi acuan untuk DPC PDIP KBB untuk meningkatkan kualitas model sosialisasi politik masyarakat. Adapun juga kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan modelsosialisasi politik masyarakat DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang menunjang terhadap pengembangan konsep ilmu pemerintahan terhadap kualitas sosialisasi politik masyarakat. Adapun juga sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan model sosialisasi politik masyarakat.

1.3.2.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara langsung maupun tidak langsung terhadap praktek kehidupan sehari-hari diantaranya:

- a. Bagi DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat, hasil penelitian diharapkan dapat mengoptimalkan sosialisasi politik kepada masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

- b. Bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh partai politik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjadi salah satu bentuk tulisan yang perlu disampaikan oleh peneliti. Manfaat penelitian ini erat hubungannya dengan tujuan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui optimalisasi model sosialisasi politik kepada masyarakat yang dilaksanakan PDIP Kabupaten Bandung Barat.
- b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang penyelenggaraan sosialisasi politik kepada masyarakat yang diselenggarakan partai PDIP.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dijelaskan dari para pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan sosialisasi politik masyarakat.